

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya pengaruh *size*, *wealth*, *intergovernmental revenue*, dan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2021 dan mencapai beberapa kesimpulan.

Pertama, variabel *size* dilakukan pengukuran menggunakan proksi total aset yang ada pada neraca LKPD. Berdasarkan hasil olah data, *size* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka, besar atau kecilnya ukuran suatu pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kedua, variabel *wealth* dilakukan pengukuran dengan PAD dibagi total pendapatan yang ada di dalam laporan realisasi anggaran LKPD. Berdasarkan hasil olah data, disimpulkan bahwa *wealth* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan begitu, besar atau kecilnya tingkat kekayaan suatu pemerintah daerah akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ketiga, variabel *intergovernmental revenue* dilakukan pengukuran dengan dana perimbangan dibagi total pendapatan yang ada di dalam laporan realisasi anggaran LKPD. Berdasarkan hasil olah data, disimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga tingkat penerimaan *intergovernmental revenue* suatu daerah akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keempat, pajak daerah dilakukan pengukuran dengan pajak daerah dibagi total pendapatan yang ada di dalam laporan realisasi anggaran LKPD. Berdasarkan hasil olah data, disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga besar kecilnya penerimaan pajak yang dihasilkan suatu pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kelima, variabel moderasi yaitu belanja modal dilakukan pengukuran menggunakan proksi total realisasi belanja modal dalam LRA LKPD. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, belanja modal tidak memoderasi hubungan antara *size* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil tersebut disimpulkan besar kecilnya total realisasi belanja modal suatu pemerintah daerah tidak dapat memoderasi hubungan antara *size* dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keenam, belanja modal tidak memoderasi hubungan *wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya total realisasi belanja modal suatu pemerintah daerah tidak dapat memoderasi hubungan antara *wealth* dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ketujuh, belanja modal tidak memoderasi hubungan antara *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa jumlah total realisasi belanja modal suatu pemerintah daerah tidak dapat memoderasi hubungan antara *intergovernmental revenue* dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kedelapan, variabel moderasi belanja modal tidak memoderasi hubungan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya total realisasi belanja modal suatu pemerintah daerah tidak dapat memoderasi hubungan antara pajak daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

V.2 Saran

Terdapat beberapa saran dari peneliti yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Bagi pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota di Indonesia, dapat menetapkan target spesifik dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk menimalisir penggunaan dana perimbangan guna mewujudkan kemampuan desentralisasi dan kemandirian keuangan daerahnya. Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi lokasi potensial untuk pengembangan destinasi wisata, serta bekerjasama dengan pihak swasta dan

komunitas lokal terkait pengembangan infrastruktur dan promosi pariwisata yang dapat mendorong adanya sumber-sumber pajak dan retribusi daerah sehingga meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

- b. Bagi pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota di Indonesia, dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya dengan melaksanakan program edukasi pajak yang terstruktur kepada masyarakat melalui sekolah, media lokal, dan acara komunitas. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data untuk mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, serta dapat melakukan pendekatan secara langsung untuk edukasi dan dukungan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Pengoptimalan penerimaan pajak daerah tersebut dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri dan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya.
- c. Bagi pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota di Indonesia, dapat mengoptimalkan alokasi belanja modal dengan melakukan survei terkait kebutuhan masyarakat dan analisis *cost-benefit* untuk menentukan proyek pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang mendesak guna menunjang produktivitas masyarakat. Pemerintah daerah dapat menyusun timeline yang jelas terkait implementasi proyek serta menetapkan indikator keberhasilan agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Pengoptimalan alokasi belanja modal yang dilakukan secara efisien dan tepat sasaran dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan analisis longitudinal untuk melihat tren kinerja keuangan pemerintah daerah dalam periode waktu yang lebih panjang. Selain metode kuantitatif yang menjadi dasar dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggabungkan metode kualitatif, seperti wawancara atau studi kasus guna mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.